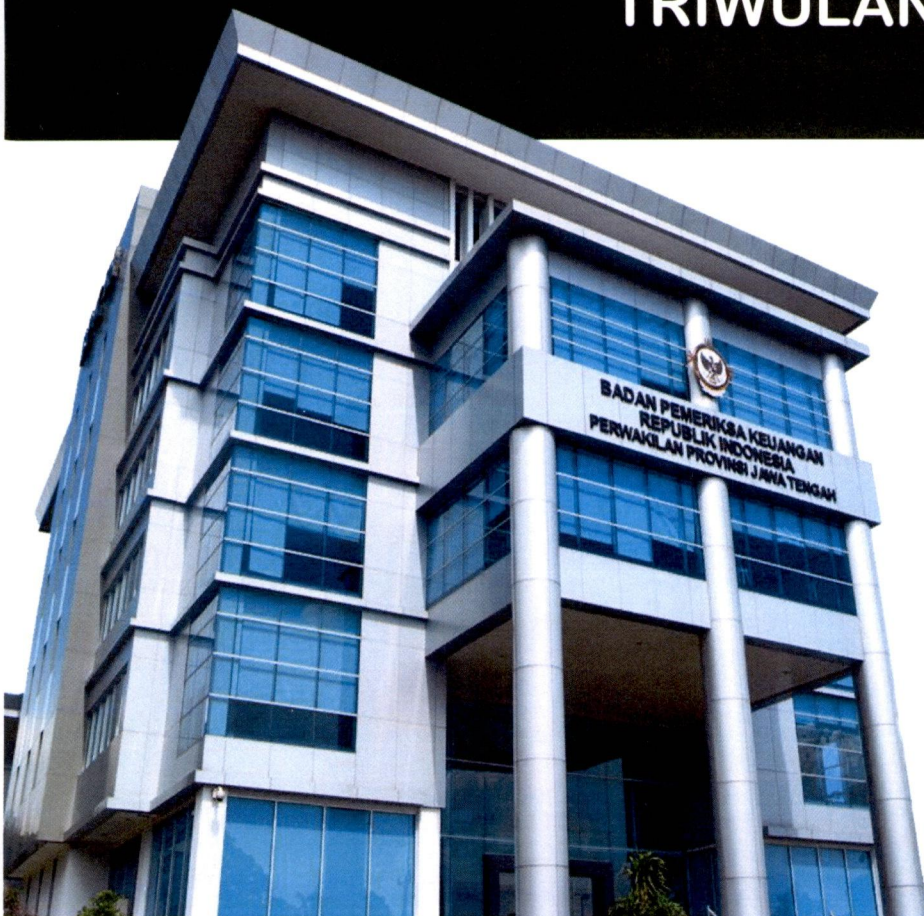




LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II TAHUN 2023



INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Hal Cover 1

BAB I Pendahuluan 2

A. Latar Belakang..... 2

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 4

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 5

BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 8

A. Perencanaan Strategis 8

B. Target Kinerja 9

1. Perjanjian Kinerja 9

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 17

A. Hasil Evaluasi AKIP 17

B. Capaian Kinerja Organisasi 17

C. Analisis Efisiensi 36

D. Perubahan Budaya Kerja 37

E. Realisasi Anggaran 38

F. Inovasi 38

G. Penghargaan 39

BAB IV Penutup 40

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan "Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2023".

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah selama Triwulan III Tahun 2023, dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Triwulan III Tahun 2023 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Oktober 2023

Kepala Perwakilan,


Hari Wihoho

NIP. 196810011996031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I dan LAKIN BPK.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

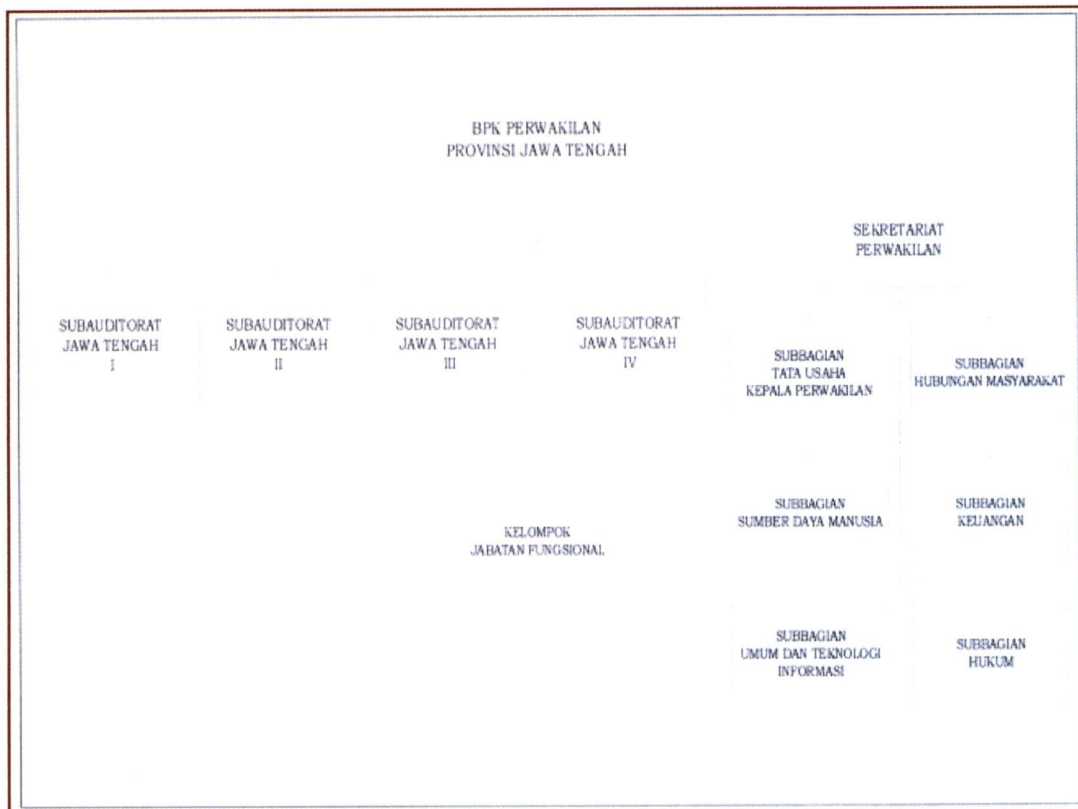
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hokum, hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon III sebagai berikut:

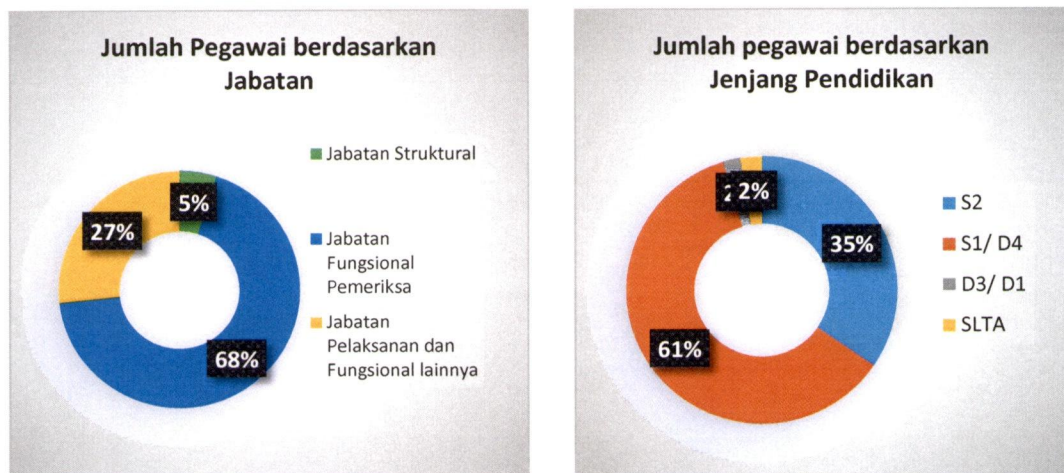
Sub Auditorat	
Tugas: Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi	
Sub Auditorat Jateng I Lingkup Pemeriksaan 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Kabupaten Semarang 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang 5. Kabupaten Demak 6. Kabupaten Jepara 7. Kabupaten Kudus 8. Kabupaten Pati 9. Kabupaten Rembang	Sub Auditorat Jateng II Lingkup Pemeriksaan 1. Kabupaten Boyolali 2. Kabupaten Klaten 3. Kabupaten Sukoharjo 4. Kabupaten Wonogiri 5. Kota Surakarta 6. Kabupaten Blora 7. Kabupaten Grobogan 8. Kabupaten Karanganyar 9. Kabupaten Sragen
Sub Auditorat Jateng III Lingkup Pemeriksaan 1. Kabupaten Banjarnegara 2. Kabupaten Cilacap 3. Kabupaten Kebumen 4. Kabupaten Purbalingga 5. Kabupaten Magelang 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Temanggung 8. Kabupaten Wonosobo 9. Kota Magelang	Sub Auditorat Jateng IV Lingkup Pemeriksaan 1. Kabupaten Boyolali 2. Kabupaten Klaten 3. Kabupaten Sukoharjo 4. Kabupaten Wonogiri 5. Kota Surakarta 6. Kabupaten Blora 7. Kabupaten Grobogan 8. Kabupaten Karanganyar 9. Kabupaten Sragen
Sekretariat Perwakilan Tugas : menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Susunan organisasi : Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	

Gambar 1.2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon III

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah per 30 September 2023 berjumlah 269 Pegawai Tetap (terdiri dari 12 pejabat struktural, 187 pejabat fungsional pemeriksa, serta 70 staf dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya), 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 30 Pegawai Tidak Tetap.



Gambar 1.3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44.647.405.000,00 dengan target 663 output. Sampai triwulan III Tahun 2023 telah dilakukan revisi anggaran, sehingga alokasinya menjadi Rp57.816.178.000 dengan target sebanyak 698 output.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Isu strategis tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kinerja Pembangunan Pansimas pada dua entitas pemeriksaan
- Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata pada dua entitas pemeriksaan

- c. Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur pada dua entitas
2. Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Sesuai GUID 5270-*Guideline for the Audit of Corruption Prevention*, program antikorupsi utamanya berfokus pada 3 elemen utama yakni pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*), dan reaksi (*reaction*). Adapun peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat dibagi menjadi empat kegiatan yaitu:

Dilaksanakan oleh AKN / Perwakilan	Dilaksanakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI)
a. Pencegahan	c. Investigasi
b. Pendeteksian	d. Dukungan Litigasi

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas, BPK perlu menyusun Inisiatif Strategis (IS) “Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara”. Proses perumusan IS ini mendasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 serta Arah Kebijakan BPK yaitu arah kebijakan pertama “peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan”, pada Strategi 2 yaitu “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Pengampu IS ini adalah AUI namun dalam pelaksanaan IS ini diperlukan sinergi dan kerja sama dengan seluruh unit kerja lain di BPK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan.

Salah satu aktivitas IS 2.2 adalah penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di Entitas yang terdiri dari kegiatan Reviu Sistem Pencegahan Korupsi di entitas melalui Pemeriksaan Non Investigatif, Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional dan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK dan AN PK), Pemberian pendapat atas Kebijakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Fraud Awareness Training bagi entitas. Kegiatan reviu sistem dan pemeriksaan kinerja Stranas PK dan AN PK dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik BPK tahun 2022 yang dikelompokkan pada pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 7 khususnya Program Prioritas (PP) 3 Penegakan Hukum Nasional. Pemeriksaan tematik yang dilaksanakan adalah ***pemeriksaan efektivitas sistem pencegahan korupsi dan Stranas PK***.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Perencanaan Strategis

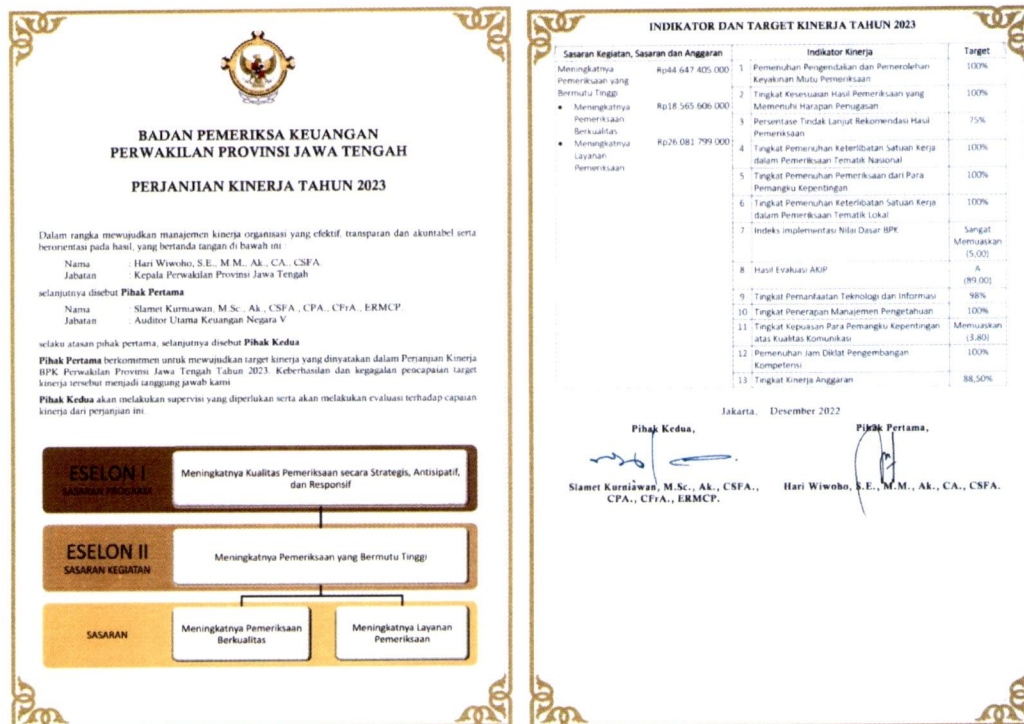
BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

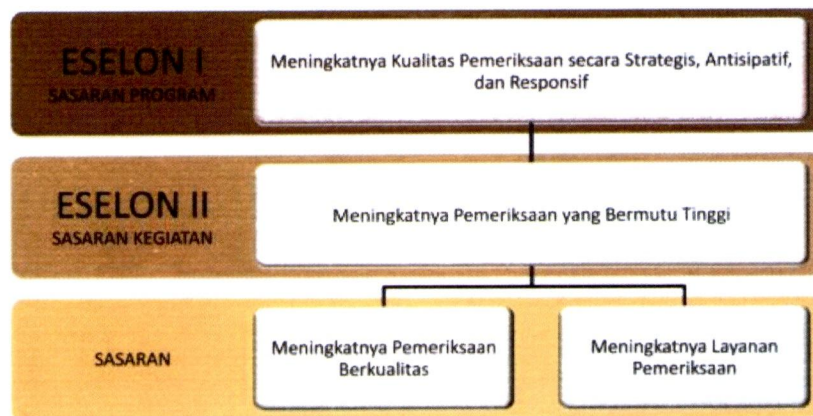
Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I, dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V.

Untuk lebih jelasnya, berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 2.2 Peta Strategis Tahun 2023

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

Tabel 2.1
INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2023
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: - Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas - Meningkatnya layanan pemeriksaan	Rp44.647.405.000,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2023

Rencana Aksi menyajikan aktivitas utama per triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi unit kerja. Pada bagian ini hanya dijelaskan secara umum atas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja yang diampu oleh unit/satuan kerja. Rencana Aksi secara detail dalam bentuk tabel menjadi lampiran laporan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

TAHUN 2023

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Tahun : 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif						
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pernerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember 2023 Januari dan Februari 2023 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Maret s.d. Mei 2023 - Memingkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapring dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Juni 2023 - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Tercerai LKPD atau 36 entitas Juli dan Agustus 2023 - Perencanaan pemeriksaan disusun secara akurat dan lebih awal - Penyusunan tim disusun lebih awal dan matang September s.d. Desember 2023 - Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							/(QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapring dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember 2023 Januari dan Februari 2023 - Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2023 Maret 2023 - Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 April s.d. Juni 2023 :- Juli dan Agustus 2023 - Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 September dan Oktober :- November dan Desember 2023 - Mereview kesesuaian Simpul dalam Konsep LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember 2023 Januari s.d. Mei 2023 - Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK - Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ke dalam status Telah Selesai (TS) Juni 2023 Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								Juli s.d. November 2023 • Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK • Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL • Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL • Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ke dalam status Telah Selesai (TS) Desember 2023 • Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember 2023	Januari dan Februari 2023 :- Maret s.d. Juni 2023 • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional • Koordinasi terkait tema pemeriksaan tematik nasional dalam rangka persiapan pemeriksaan Juli s.d. Agustus 2023 • Persiapan SDM dan sarana prasarana pemeriksaan tematik nasional September s.d. November 2023 • Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tematik nasional Desember 2023 :-
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2023	Januari s.d. Maret 2023 • Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan April s.d. Juni 2023 • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan Juli s.d. September 2023 • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan

3

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								• Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan Oktober s.d. Desember 2023 • Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan • Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember 2023	Januari s.d. April 2023 :- Mei dan Juni 2023 • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Juli dan Agustus 2023 • Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal • Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah • Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal September s.d. November 2023 • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal Desember 2023 :-
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember 2023	Januari s.d. Maret 2023 • Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penggunaan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penggunaan pemeriksaan LKPD • Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Penyerahan Pimpinan maupun rapat - rapat yang dilaksanakan • Fakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD • Penyerahan Kepala Perwakilan terkait IIP April s.d. Juni 2023 :- Juli s.d. September 2023 • Menginformasikan dan monitoring responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK Oktober s.d. Desember 2023 :-

4

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (\$9,00)	-	-	-	A (\$9,00)	Desember 2023	Januari s.d Maret 2023 - Penyusunan Rencana Aksi pencapaian kinerja tahun 2023 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menaati pada aturan berlaku April s.d Juni 2023 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menaati pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Trivulan I 2023 dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Juli s.d September 2023 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menaati pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Trivulan II 2023 dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Oktober s.d Desember 2023 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menaati pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Trivulan III 2023 dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi - Penyusunan L-AKIN Tahun 2023
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%	Desember 2023	Januari s.d Desember 2023 - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakil, memanfaatkan aplikasi persuratan (JASMIN), dan (SiAP I.K, SiAP Bamparol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakil, memanfaatkan aplikasi dan pemutakhiran data pada SISDM - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakil, memanfaatkan aplikasi persuratan, dan (SiAP I.K, SiAP Bamparol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan

5

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								- Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakil, memanfaatkan aplikasi dan pemutakhiran data pada SISDM - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25% (2 aktivitas)	37,5% (3 aktivitas)	75% (4 aktivitas)	100% (4 aktivitas)	Desember 2023	Januari s.d Maret 2023 - Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> Tahun 2022 - Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakil - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (<i>Diklat, peer assist</i>) April s.d Juni 2023 - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (<i>wawancara berbasis pengetahuan</i>) Juli s.d September 2023 - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (<i>In House Training</i>) Oktober s.d Desember 2023 - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (<i>In House Training</i>)
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember 2023	Januari s.d Februari 2023 - Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakil salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit April s.d Mei 2023 - Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan LKPD ke seluruh entitas Juni s.d Agustus 2023 - Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakil salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit September s.d Desember 2023 - Mengirimkan form survey kepuasan kinerja Pemeriksa untuk pemeriksaan semester II

Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

6

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP				
			TW I		TW II		TW III		TW IV							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)				
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember 2023	Januari 2023 • Ujulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan Balai Diklat • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai Februari 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai Maret 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai April 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai Mei 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai Juni 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) Juli 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) Agustus 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)

7

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
												September 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) Oktober 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) November 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) Desember 2023 • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	Desember 2023	Januari 2023 • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2022 dan Kebutuhan TA. 2022 • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran • Menyusun data capaian output • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output Februari s.d Juni 2023 • Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran

8

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								Juli 2023 • Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester I • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output. Agustus s.d November • Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran Desember 2023 • Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester II • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran • Menyusun data capaian output

Keterangan:

- Kolom (1) : *Diisi dengan nomor urut IKU Unit Satuan Kerja*
 Kolom (2) : *Diisi dengan nomenklatur IKU Unit Satuan Kerja*
 Kolom (3) : *Diisi dengan Target Tahun 2023*
 Kolom (4) s.d. (7) : *Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis unit/satuan kerja dan juga target tahunan*
 Kolom (8) : *Diisi dengan rencana waktu penyelesaian*
 Kolom (9) : *Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja*

Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV. Unit/satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.

Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal 4 aktivitas yang berbeda selama Tahun 2023).

Gambar 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Selama 3 tahun terakhir, hasil evaluasi AKIP pada Perwakilan Jawa Tengah telah mengalami peningkatan. Atas hasil tersebut, Perwakilan Jawa Tengah senantiasa berupaya melakukan perbaikan, diantaranya :

1. Melakukan analisis permasalahan pada Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
2. Adanya dukungan dan komitmen dari Manajemen serta pengelola kinerja di Perwakilan Jawa Tengah; dan
3. Komunikasi intensif dengan Itama terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reuiu data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Color Range	Deskripsi
	Skor $\geq$ 100
	$80 \geq$ Skor $<$ 100
	Skor $<$ 80

- Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator
- Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

Selama Triwulan III/2023, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta pemantauan tindak lanjut semesteran;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan perkantoran; dan
- Pengembangan inovasi perwakilan dalam bidang kearsipan.

Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut:



Capaian kinerja atas tiga belas indikator secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

	Indikator Kinerja IKU		Target Tahun 2023	Target TW III / 2023	Realisasi TW III / 2023	Skor Kinerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Sasaran: Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40%	40,00%	100,00
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	0,00%	0,00
	IKU 3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	93,87%	105,00
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0,00%	0,00
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00%	100,00
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0,00%	0,00
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00			
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00			
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	95%	83,90%	88,31
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	50%	101,43%	105,00
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80			
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	70%	94,78%	105,00
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	88,50%	88,59%	100,11

Adapun perbandingan realisasi Triwulan III Tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW III/ 2023	Realisasi TW III/ 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40%	40,00%	98, 11%	86,22%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0%	0,00%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	93,87%	92,47%	87,71%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0%	0,00%	102,01%	100,88%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,13%	100,29%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0%	0,00%	101,11%	100,99%
Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas Meningkatnya layanan pemeriksaan Meningkatnya	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK			4,84	4,43
	Hasil Evaluasi AKIP			90,14	86,01
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	83,90%	96,21%	99,18%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	50%	101,43%	101,43%	100%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi			4,26	4,09
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	70%	94,78%	100,00%	100%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	88,59%	90,62%	91,21%

Perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi TW III /2023	Capaian TW III/ 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	40,00%	40,00%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	93,87%	125,16%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		0,00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05		0,00%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	83,90%	83,90%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	101,43%	101,43%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80		0,00%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	94,78%	94,78%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7%	88,59%	98,66%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
2. hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan

Tabel 3.4 Capaian IKU 1

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	40%	100%
Realisasi *)	78,47%	86,22%	98,11%	40%	
Capaian	78,47	86,22	98,11	100	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			98,11%	40%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan telah terealisasi 40%, sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Triwulan III.

Dalam mendukung ketercapaian target ini, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar reviu sampai dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) **Kinerja dan DTT** yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tabel 3.5 Capaian IKU 2

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	0%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	-	
Capaian	100	100	100	-	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	-	-	100%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan akan terealisasi pada Triwulan IV, setelah Pemeriksaan Kinerja dan DTT selesai dilaksanakan. Sehingga pada hasil pengukuran Triwulan III, belum terdapat realisasi.

Perwakilan Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk senantiasa menjaga kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh unsur dari Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta Harapan Penugasan.

Peran unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk kepentingan publik yang dilaksanakan secara efektif, ekonomis dan efisien.

Selain itu, perwujudan komitmen ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan berupa *in-house training*, *knowledge transfer forum*, atau rapat-rapat pengarahan antara manajemen dengan para pemeriksa sehingga dapat terwujud sinergi dalam menjaga komitmen.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee *sejak tahun 2005*.

Tabel 3.6 Capaian IKU 3

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi *)	85,78%	87,71%	92,47%	93,87%	
Capaian	105	105	105	105	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	-	-	123,29%	125,16%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 3- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada TW III/2023 adalah sebesar 93,87% dari target sebesar 75%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah setempat.

Secara rinci, penghitungan persentase atas IKU-3 sebagai berikut:

Formula		
$((a + d) / e) \times 100\%$		
3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a)	=	28.717
3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b)	=	1.677
3.3. Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (c)	=	203
3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d)	=	77
3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee (e)	=	30.674
Realisasi IKU 3	=	$((a+d)/e) \times 100\%$ = 93,87%

Realisasi pada TW III/2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian target ini didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan para *stakeholder* untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat

pemanfaatan teknologi informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Untuk mempertahankan capaiannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya untuk mengupayakan langkah-langkah strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah melalui dosir-dosir entitas senantiasa mengingatkan kepada Inspektorat tiap daerah sebagai *counterpart* untuk selalu memperbarui data tindak lanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan. IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan tematik Nasional akan terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian IKU 4

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	-	100%
Realisasi *)	101,52%	100,88%	102,01%	-	
Capaian	101,52	100,88	102,01	-	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	-	-	102,01%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi, IKU 4 akan terealisasi pada Triwulan IV.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

Tabel 3.8 Capaian IKU 5

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III/ 2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100,29%	100,13%	100%	
Capaian	100	100,29	100,13	100,00	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			100,13%	100%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam satu Unit Kerja Eselon I yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Standar penilaian IKU 5 adalah apabila **ada permintaan** perhitungan kerugian daerah/negara dari pemangku kepentingan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal **satu kali** dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's, dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Capaian IKU 6

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	0%	100%
Realisasi *)	100%	100,99%	101,11%	-	
Capaian	100	100,99	101,11	-	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			101,11%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi, IKU 6 akan terealisasi pada Triwulan IV.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sesuai rencana aksi, IKU 7 akan terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU 7

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	0%	5,00
Realisasi *)	4,59	4,43	4,84	-	
Capaian	91,80	88,60	96,80	-	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			96,80%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sejak tahun 2022, capaian atas IKU 7 mengalami peningkatan. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai – nilai dasar BPK telah menjadi budaya kerja yang mulai diterapkan dengan baik oleh para pegawai.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya:

- 1) Mengadakan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK
- 2) Meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK
- 3) Memberikan *reward* dan *punishment* secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar
- 4) Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan
- 5) Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari Itama. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Capaian IKU 8

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	86,00	86,00	88,00	0%	90,05
Realisasi *)	92,24	86,01	90,14	-	
Capaian	105	98,86	102,43	-	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			100,10%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan

evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai Rencana Aksi, IKU 8 akan terealisasi pada Triwulan IV.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU ini diukur berdasarkan pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

1. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%) diukur dari pembaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu unit kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.
2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Eselon IV dalam satu unit kerja.
3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SMP dalam satu unit kerja Pemeriksaan.
4. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP untuk setiap Tim Pemeriksa dalam satu unit kerja.
5. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (25%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiPTL dan tingkat validasi level satuan kerja atas data tindak lanjut yang diinput entitas.

Tabel 3.12 Capaian IKU 9

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	95%	96%	97%	95%	100%
Realisasi *)	99,18%	99,18%	96,21%	83,90%	
Capaian	104,39	103,31	99,19	88,31	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			99,19%	83,90%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-9 pada Triwulan III/ 2023 sebesar 83,90% masih dibawah target triwulan yang ditetapkan (95%), sehingga skor capaiannya sebesar 88,31. Secara rinci dapat dijelaskan pada formulasi berikut:

<u>Formula</u>			
a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	=		97,50%
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	=		91,39%
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	=		77,78%
d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	=		52,00%
e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	=		98,94%
Realisasi IKU 9 =	(20% x a) + (15% x b) + (20% x c) + (20% x d) + (25% x e)	=	83,90%

Meski demikian, IKU ini telah menunjukkan bahwa para pegawai telah memanfaatkan layanan TIK secara optimal yang ditandai dengan tingginya kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai user. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pengukuran Manajemen Pengetahuan dilihat dari dua unsur, yaitu:

A. *Innovative Practice* (tingkat penyusunan atau penerapan Best Practise) yaitu:

- 1) Usulan *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Satuan kerja dapat

mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*.

- 2) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

Untuk Tahun 2023, Perwakilan Jawa Tengah telah mengusulkan *Best Practise* dengan judul ***Manajemen Integrasi kalender akun bpk.go.id*** yang telah di akui dan mendapat pengesahan dari Tim Penilai *Best Practise* melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK No. 577/ND/XII.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

- B. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Sampai dengan Triwulan III, aktivitas manajemen pengetahuan yang sudah dilaksanakan meliputi:

- 1) Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2022
- 2) *Peer assist*
- 3) Wawancara Berbasis Pengetahuan "menciptakan suasana kerja yang kondusif"
- 4) In House Training :
 - Tips dan Teknik Pemeriksaan Internasional (IAEA)
 - Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan
 - Pemeriksaan Bangunan dan Gedung

Atas output tersebut, maka realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 101,43%, dengan target triwulanan yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga mendapat skor 105. Hal ini mengindikasikan bahwa Manajemen Pengetahuan telah terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 3.13 Capaian IKU 10

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	TW II / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	50%	100%
Realisasi *)	150%	100%	101,43%	101,43%	
Capaian	105	100	101,43	105,00	
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024			101,43%	101,43%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU Tingkat Penerapan manajemen Pengetahuan selama dua tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan. Diharapkan capaian baik ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra BPK 2020-2024. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet BPK dan aplikasi JASMIN untuk mengunggah usulan *best practice*. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi *best practice*.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain.

- 1) Peningkatan pemahaman atas *knowledge management* dan *best practice*;
- 2) Sistem *rewarding* atas usulan *Best Practice* dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice* level BPK Wide secara lebih memadai;
- 3) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK;
- 4) Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal *knowledge management* terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media *best practice sharing*.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS *Best Practice Sharing* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan *best practice* sesuai dengan Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan *best practice* di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK.

Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui **survei oleh lembaga independen** yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

1,00 - 1,99	sangat tidak memuaskan
2,00 - 2,99	tidak memuaskan
3,00 - 3,99	memuaskan
4,00 - 5,00	sangat memuaskan

Tabel 3.14 Capaian IKU 11

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	0	3,80
Realisasi *)	3,94	4,09	4,26	-	
Capaian	103,68	105	105	-	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			112,10%	-	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Sesuai Rencana Aksi Tahun 2023, IKU 11 akan terealisasi pada Triwulan IV. Berdasarkan tabel diatas, IKU 11 telah mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Ketercapaian tersebut didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang dibangun secara berkelanjutan, baik oleh

jajaran manajemen, para pemeriksa pada saat pemeriksaan, atau staf lain melalui sarana kehumasan BPK.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk terus membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (online) melalui *e-learning* dan *Learning Management System (LMS)* sebagai penyesuaian selama kondisi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN) dan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut-off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Tabel 3.15 Capaian IKU 12

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	100%	100%	100%	70%	100%
Realisasi *)	97,35%	100%	100%	94,78%	
Capaian	97,35	100	100	105	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			100%	94,78%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-12 pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 94,78% dari target sebesar 70%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Ketercapaian ini karena komitmen seluruh pegawai untuk terus mengembangkan kompetensinya, juga dukungan atasan langsung dan peran serta subbag SDM yang pro aktif dalam melakukan monitoring jam diklat pegawai.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara berkala akan melakukan monitoring jam diklat, mengadakan Diklat Pembekalan bagi para Pemeriksa yang akan melaksanakan Pemeriksaan LKPD serta mengikutsertakan diklat secara daring bagi Pemeriksa di sela-sela waktu diluar kegiatan pemeriksaan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara rutin juga mengadakan diklat bertema Kesekretariatan bagi para pegawai untuk mendukung kegiatan rutin kesekretariatan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek **implementasi Kinerja Anggaran**. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
3. Pencapaian output
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi **pelaksanaan anggaran belanja** pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 3.16 Capaian IKU 13

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	TW III / 2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50	89,70%
Realisasi *)	92,26%	91,21%	90,62%	88,59	
Capaian	105	104,24	102,98	100,11	
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024			101,02%	98,66%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 88,59% dari target sebesar 88,50%, sehingga capaiannya sebesar 100,11.

Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama Subbag Keuangan dalam melakukan monitoring atas penyerapan anggaran.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya memonitor anggaran dengan mempertimbangkan aspek penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian penyerapan terhadap perencanaan, fokus pada output serta efisiensi.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2-Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efiseiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Penggunaan aplikasi BPK di antaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi di antaranya efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;

- b. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* untuk melaksanakan komunikasi dengan *stakeholder* atau rapat-rapat internal dapat mengefisiensikan anggaran makan dan minum.
2. Pengelolaan BMN,
 - a. Adanya inovasi berupa pemusnahan arsip kelas 4, memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;
 - b. Pemanfaatan fitur *file sharing* melalui jaringan internal BPK Perwakilan Jawa Tengah meminimalisir ruang penyimpanan arsip *hardcopy*.
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 - a. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non pemeriksaan
 - b. Penghapusan anggaran honorarium
4. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

D. Perubahan Budaya Kerja

Salah satu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengaplikasikan penerapan nilai-nilai dasar tersebut adalah **Jogo Konco** yaitu saling menjaga antar pegawai maupun antar unit kerja agar IIP terwujud serta saling menghargai dan mendukung profesi sesuai tupoksi masing-masing pegawai maupun antar unit kerja agar tercapainya sinergi, serta **Jateng Produktif** yaitu meningkatkan kerjasama antar pegawai maupun antar unit kerja guna mewujudkan kinerja yang tinggi dengan berpegang teguh pada IIP.

Penerapan IIP saat ini di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian penerapan IIP perlu terus dijaga dan ditingkatkan dengan adanya upaya saling dukung dari seluruh pegawai maupun unit kerja terkait. Dalam mewujudkan budaya kerja Jogo Konco dan Jateng Produktif, dibentuk tim pengembangan dan penerapan budaya kerja. Tim ini melakukan sosialisasi budaya kerja di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya:

1. Kristalisasi motto "**Jogo Konco untuk Jateng Produktif**" menjadi 3 perilaku yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso dan Jogo Toto:

- a. Jogo Rogo: bersama-sama antar elemen pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjaga kondisi raga/badan yang sehat;
 - b. Jogo Roso: saling bekerja sama memberi suasana positif dan kenyamanan bekerja, sehingga secara psikologis pegawai merasa aman, tenang dan damai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja; dan
 - c. Jogo Toto: Mempedomani aturan sebagai penjabaran tata tertib sebagai dasar pelaksanaan perilaku seluruh pegawai, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku yang berhubungan dengan kedinasan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai BPK Jateng ke seluruh pegawai.

E. Realisasi Anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2023 anggaran yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sebesar Rp37.852.437.214 (**65,47%**) dengan output sebanyak 541.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Keluaran	Anggaran	Realisasi			Indikator Kinerja
			Anggaran	Prosentase	Output	
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	Rp 57.816.718.000	Rp 37.852.437.214	65,47%	541	
	Layanan Perkantoran					
1	Layanan Perkantoran	Rp 27.085.689.000	Rp 19.153.955.363	70,72%	-	
2	Layanan Prasarana Internal	Rp 278.668.000	Rp 277.329.920	99,52%	1	
	Pemeriksaan Keuangan					
1	LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 686.963.000	Rp 686.602.576	99,95%	316	
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp 12.664.000	-	-	-	
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp 82.912.000	73.247.426	88,34%	2	
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp 25.020.000	-	-	-	
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp 816.951.000	Rp 496.152.100	60,73%	36	IKU 3
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Jawa Tengah	Rp 589.848.000	Rp 272.363.875	46,18%	36	IKU 3
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp 1.110.423.000	Rp 447.032.521	40,26%	9	IKU 5

8	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp 1.619.202.000	Rp 741.155.261	45,77%	16	
9	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah FAF.U21 (A)	Rp 6.983.717.000	Rp 5.812.271.877	83,23%	36	IKU 1 IKU 2 IKU 4 IKU 6
10	LHP Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Rp 5.976.905.000	Rp 5.422.885.829	90,73%	44	
11	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah FAF.U21 (G)	Rp 12.618.096.000	Rp 4.469.440.466	35,42%		IKU 1 IKU 2 IKU 4 IKU 6

F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah diterima sebagai Usulan *Best Practice* adalah **“Manajemen Integrasi kalender Akun bpk.go.id”**. Hasil pelaksanaan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi jadwal dan agenda kerja selalu *update* dan *realtime*
Sebelum menggunakan agenda yang terintegrasi, informasi atas jadwal acara di kantor Perwakilan masih berada di unit kerja masing-masing, sehingga menyulitkan koordinasi. Setelah menggunakan integrasi kalender, jadwal kegiatan lebih terorganisir dan mempermudah koordinasi antar unit kerja dan tamu.
2. Koordinasi menjadi lebih cepat karena menggunakan fitur yang sama
3. Dapat dipantau oleh semua pihak
Bagi internal pegawai, kegiatan dapat dipantau melalui gawai masing-masing; bagi tamu eksternal, dapat melihat agenda yang akan/ sedang berlangsung melalui layar TV yang terpasang di Lobby kantor perwakilan.

G. Perhargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1 pemanfaatan aplikasi kepegawaian Tahun 2023;
2. Peringkat 1 pengelolaan SKP Tahun 2023;
3. Peringkat III pemutakhiran data kepegawaian Tahun 2023;
4. Terbaik I Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Tahun 2022;
5. Peringkat Terbaik Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENUTUP

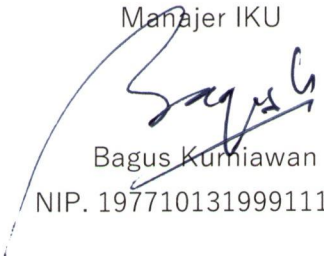
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2023, pencapaian Skor Kinerja BPK pada Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar **49,96**. Untuk menyempurnakan skor kinerja selama tahun 2023, diperlukan perbaikan di antaranya meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, meningkatkan kualitas Laporan Hasil pemeriksaan serta perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2023 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dalam membantu pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Semarang, 31 Oktober 2023

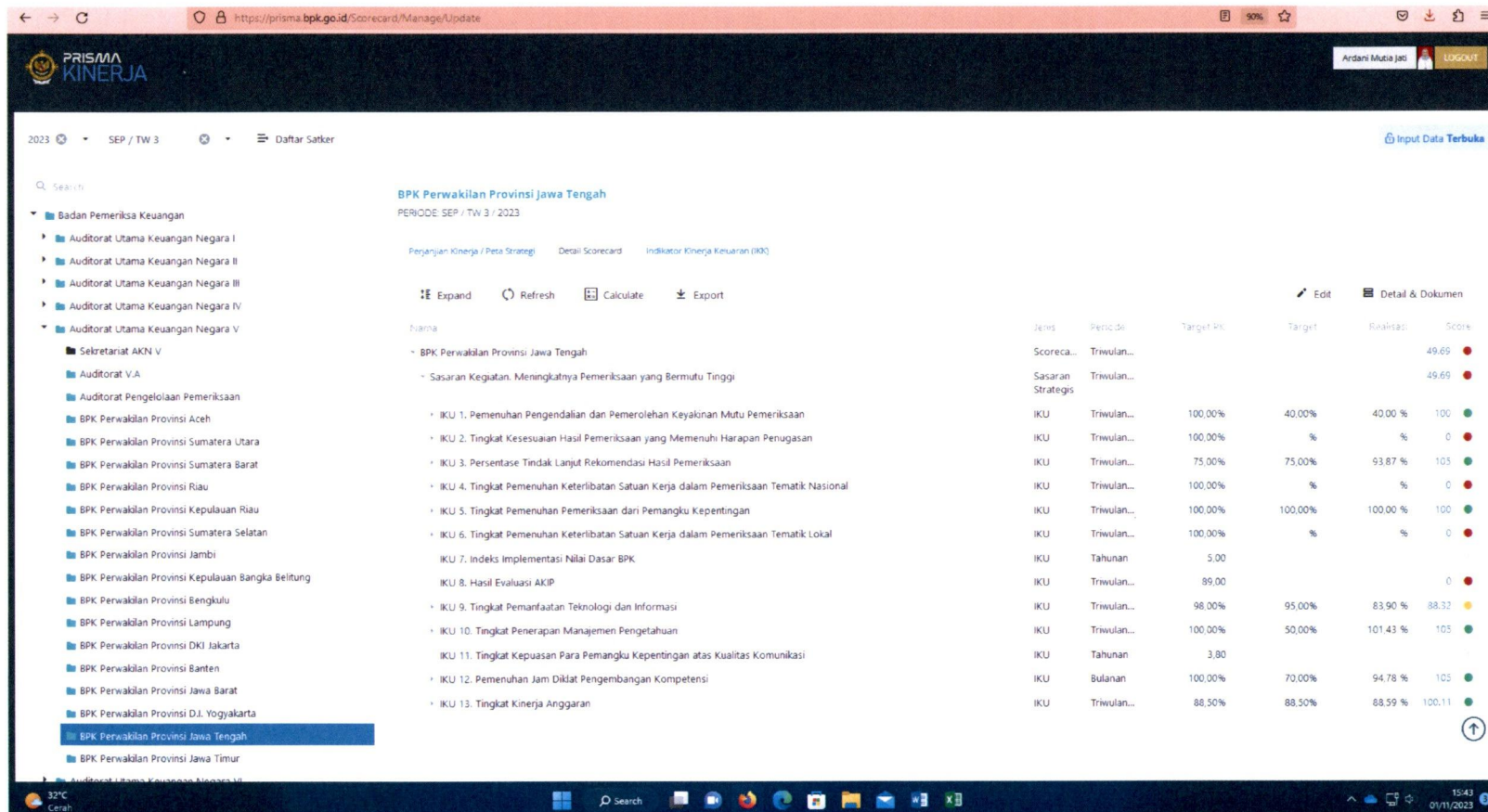
Manajer IKU


Bagus Kurniawan
NIP. 197710131999111001

Mengetahui ,
Kepala Perwakilan


Hari Wihoho
NIP. 196810011996031003

SKOR KINERJA BERDASARKAN APLIKASI PRISMA TRIWULAN III/2023



2023 SEP / TW 3 Daftar Sarker

PRISMA KINERJA

Search

Badan Pemeriksa Keuangan

- Auditorat Utama Keuangan Negara I
- Auditorat Utama Keuangan Negara II
- Auditorat Utama Keuangan Negara III
- Auditorat Utama Keuangan Negara IV
- Auditorat Utama Keuangan Negara V
 - Sekretariat AKN V
 - Auditorat V.A
 - Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan
 - BPK Perwakilan Provinsi Aceh
 - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
 - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
 - BPK Perwakilan Provinsi Riau
 - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
 - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
 - BPK Perwakilan Provinsi Jambi
 - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
 - BPK Perwakilan Provinsi Lampung
 - BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 - BPK Perwakilan Provinsi Banten
 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
 - BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**
 - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
PERIODE: SEP / TW 3 / 2023

Penjelasan Kinerja / Peta Strategi Detail Scorecard Indikator Kinerja Keuangan (IKK)

Expand Refresh Calculate Export

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Scorecard	Triwulan...			49.69	
Sasaran Kegiatan, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...			49.69	
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100.00%	40.00%	40.00 %	100
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100.00%	%	%	0
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75.00%	75.00%	93.87 %	105
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100.00%	%	%	0
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100.00%	%	%	0
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5.00			
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	89.00			0
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	98.00%	95.00%	83.90 %	88.32
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100.00%	50.00%	101.43 %	105
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3.80			
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100.00%	70.00%	94.78 %	105
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	88.50%	88.50%	88.59 %	100.11

32°C
Cerah

15:43
01/11/2023